



Dr. Drs. REYDONNYZAR MOENEK, M.Devt.M., merupakan Sekretaris Jenderal DPD RI yang ahli dalam bidang desentralisasi fiskal, investasi, keuangan daerah. Perekonomian daerah adalah spesialisasi program yang ditekuninya dengan pengalaman pekerjaan sebagai pengajar/pengajar tamu, konsultan lepas pada berbagai institusi bidang ekonomi, keuangan, manajemen dan desentralisasi fiskal dalam dan luar negeri. Penyusun modul berbagai pelatihan/pendidikan ekonomi, keuangan dan manajemen, pembicara/keynote, speakers/organizer seminar dalam dan luar negeri bidang ekonomi, politik, keuangan, manajemen dan desentralisasi fiskal, saksi ahli bidang pemerintahan daerah dan keuangan daerah.



Dr. H. DADANG SUWANDA, S.E., M.M., M.Ak., Ak., CA., merupakan dosen Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dengan spesifikasi bidang keuangan, audit, dan akuntansi pemerintah daerah. Selain itu, merupakan widyaiswara tidak tetap pada Badan Diklat/Pusat Pengembangan SDM Kementerian Dalam Negeri. Aktif menulis buku, jurnal, prosiding, maupun artikel versi cetak dan online yang telah banyak beredar secara nasional dan internasional. Dengan kompetensi dan sejumlah pengalaman yang dimilikinya, kini sering dipercaya sebagai pembicara pada berbagai acara seminar, pelatihan, dan workshop tingkat nasional dan daerah terutama terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Prof. Dr. H. WIRMAN SYAFRI, M.Si., merupakan Guru Besar Administrasi Negara yang saat ini sebagai Kepala Lembaga Pengawasan dan Penjaminan Mutu Internal IPDN. Berbagai jabatan karier telah diembannya, antara lain Kasi Penataan dan Pembinaan Bantuan Desa pada Dit. Bangdes Provinsi Sumatera Selatan (1998-1990), Kepala Bidang Pelatihan pada STPDN (2000-2001), Pembantu Ketua Bidang Akademik STPDN (2002-2003), Direktur Lembaga Pengkajian IPDN (2004-2007), Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN (2009-2010), Pembantu Rektor Bidang Akademik IPDN (2010-2015), Kepala Lembaga Penelitian dan Kajian IPDN (2015-2019).

FORUM KONSULTASI PUBLIK

Tujuan utama otonomi daerah adalah meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing masyarakat. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memperbaiki peningkatan pelayanan publik (masyarakat). Saat ini bentuk pelayanan yang perlu diperbaiki oleh pemerintah daerah antara lain adalah Mal pelayanan publik, menyusun standar kepuasan masyarakat, mengoptimalkan pengelolaan pengaduan, melakukan inovasi penyelenggaraan pemerintahan terutama inovasi pelayanan publik, mengevaluasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan, menyusun standar pelayanan publik, serta meningkatkan forum konsultasi publik dan meningkatkan pengelolaan sistem informasi pelayanan publik.

Buku ini fokus pada bagaimana meningkatkan forum konsultasi publik. Gambaran dari uraian di atas dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Peningkatan Pelayanan Publik

1. Mal Pelayanan Publik
2. Standar Kepuasan Masyarakat (SKM)
3. Pengelolaan Pengaduan
4. Inovasi Pelayanan Publik
5. Evaluasi Pelayanan Publik
6. Standar Pelayanan
7. **Forum Konsultasi Publik**
8. Sistem Informasi Pelayanan Publik

Tujuan Otonomi Daerah, yaitu Peningkatan:

1. Kesejahteraan Masyarakat
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Daya Saing Masyarakat

Hukum&Pemerintahan
ISBN 978-602-446-409-7



9 786024 464097
Harga P. Jawa Rp37.000,00

PT REMAJA ROSDAKARYA

Jln. Ibu Inggit Garnasih No. 40 Bandung 40252
Tlp (022) 5200287 - Fax (022) 5202529
e-mail: rosdakarya@rosda.co.id
www.rosda.co.id

Dr. Drs. REYDONNYZAR MOENEK, M.Devt.M., DKK.

Dr. Drs. REYDONNYZAR MOENEK, M.Devt.M.
Dr. H. DADANG SUWANDA, S.E. M.M., M.Ak., Ak., CA.
Prof. Dr. H. WIRMAN SYAFRI, M.Si.

